

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari-bawah-ke-atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.(Thomas Mayer, 2012, p. 30)

Ideologi, bagi parpol menurut Vassalo and Wilcox adalah pembawa ide. Dalam sistem demokrasi, menurut Sugiono ideologi akan di *break down* dalam manifesto partai dan program partai akan menjadi sikap dasar partai dalam menjalankan proses pengelolaan kebijakan negara. Urgensi ideologi bagi partai menurut Edmund Burke berangkat dari basis dasar terbentuknya yang merupakan bentuk pengorganisasian orang-orang dengan kesamaan ide. Dengan demikian, masing-masing parpol akan memiliki basis dasar kebijakan untuk mengelola kebijakan publik, dan basis dasar inilah yang akan dinegosiasikan dalam proses kebijakan.(Laili Bariroh, 2015, p. 134)

Secara konstitusional, keberadaan ideologi dan partai politik merupakan sebuah keniscayaan karena partai politik merupakan perwujudan kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Kata lain dari kekuatan yang nyata dalam masyarakat itu adalah ideologi. Sejarah masyarakat telah membentuk dua ideologi yaitu Islam dan

nasionalis. Akan tetapi kedua ideologi tersebut berusaha dibenturkan sehingga kelihatan seram dan menakutkan. Sehingga muncullah partai politik dengan ideologi yang samar-samar. Hal ini secara sosial politik memberikan dampak kepada masyarakat dan juga bagi partai politik. Dampak tersebut terlihat pada aktivitas politik partai politik dalam melaksanakan fungsinya.(Else Suhami, 2013, p. 107)

Menurut Paraniari Siahaan, untuk mengetahui kinerja partai politik di Indonesia dapat dilihat dari efektifitas partai politik menurut fungsi ideal partai politik yaitu; Pertama, disfungsi rekrutmen, proses rekrutmen didasarkan atas karir politik di partai politik, tawar menawar kepentingan, dan juga *the money of candidate* (mahar) bukan atas dasar *the capability and credibility of candidate*. Kedua, disfungsi komunikasi politik, proses ini berjalan searah dimana komunikasi bersifat *top-down* dan bukan *bottom up* sehingga artikulasi kepentingan rakyat tidak berjalan yang berakibat tidak terakomodirnya kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ketiga, disfungsi sosialisasi politik. Fungsi ini hanya dilakukan ketika waktu pemilu sudah dekat (kampanye), artinya ketika proses pemilu berakhir partai politik melupakan konstituennya dan sibuk dengan target pencapaian kepentingan politik praktis. Dan kelima, disfungsi manajemen konflik, bukannya manage konflik melainkan justru menjadi biang konflik sehingga instabilitas politik terjadi dimana penuh dengan pertarungan kepentingan antar elit, konflik antarpol, konflik antar kelompok kepentingan dan konflik berdimensi horizontal antar masyarakat.(Else Suhami, 2013, p. 107)

PDI Perjuangan sebagai partai politik memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme. Hal ini ditarik dari sejarah PDI Perjuangan sebagai estafet politik dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Faktor genealogi biologis Soekarno. Secara kepartaian politik, memang ada tiga trah Soekarno di dalam partai politik, yaitu Sukmawati Soekarnoputri yang pernah menjadi ketua umum PNI-Marhaenisme, Rachmawati Soekarnoputri yang pernah bergabung di Partai Pelopor, Partai Nasdem dan terakhir sebagai wakil ketua umum di Partai Gerindra serta Megawati Soekarnoputri yang menjadi ikon PDI dan PDI Perjuangan. (Galang Gerald, 2019, p. 139)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat PDIP dideklarasikan di Jakarta pada 14 Februari 1999. Proses lahirnya PDI Perjuangan dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Meskipun sebelum peristiwa ini terjadi, Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR. Namun, setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia. (Budi Prayitno, 2009, p. 40)

Jika dirunut ke belakang, PDI Perjuangan sebenarnya merupakan partai politik yang memiliki tali kesejarahan dengan partai politik pada masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia

(Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba.(Budi Prayitno, 2009, p. 41)

PDI Perjuangan menemui momentumnya ketika orde baru pemerintahan Soeharto lengser pada tahun 1998. Sebagai partai yang memiliki sejarah politik nasionalisme dan personifikasi politik Soekarno, maka keikutsertaan PDI Perjuangan di dalam setiap pemilu di era demokrasi mulai tahun 1999-2019 menjadi partai yang memiliki basis dan sistem kekuatan politik yang telah mapan. Artinya masyarakat dengan mudah mengidentifikasi bahwa PDI Perjuangan adalah partai nasionalistik yang memiliki wacana politik kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.(Galang Geraldy, 2019, p. 139)

PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berKetuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (TRI SILA),serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (EKA SILA). Selain itu PDI Perjuangan merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warganegara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Sukarno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan perjuangan politik. Asas partai PDI Perjuangan itu sendiri adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya 1 Juni 1945. Jatidiri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan

dan Keadilan sosial serta watak partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. PDI Perjuangan masih memakai ajaran Sukarno tentang marhaenisme sebagai dasar dari semangat perjuangannya yang tertuang dalam asas, jatidiri serta watak partai.(Wiwin Kurniasih, 2018, p. 9)

Keyakinan dan identitas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen resmi sikap dan kebijakan partai yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan menyakini bahwa Nasionalisme PDI Perjuangan adalah nasionalisme berwatak kerakyatan dan kemanusiaan. Nasionalisme kerakyatan yang digunakan PDI Perjuangan adalah nasionalisme Sukarno atau Marhaenisme seperti yang terdapat didalam sikap dan kebijakan PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan memiliki kewajiban sejarah, ideologis dan politis untuk memulihkan nasionalisme kerakyatan (sosio nasionalisme) sebagaimana yang digagas oleh Sukarno agar bisa hidup kembali sebagai bagian utuh dari seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia.(Wiwin Kurniasih, 2018, p. 9)

Ajaran Sukarno tentang marhaenisme memiliki posisi yang mendasar sebagai dasar perjuangan PDI Perjuangan. Inti marhaenisme mengalir dalam nafas gerak PDI Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno. Asas partai yang digunakan yakni Pancasila 1 Juni 1945 yang bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (sosio nasionalisme-sosio demokrasi: Marhaenisme) serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi dan berkepribadian di dalam kebudayaan (Trisakti).(Wiwin Kurniasih, 2018, p. 10)

Fenomena anomali politik di tengah konstelasi partai politik pada proses demokrasi yang telah berusia cukup matang adalah kecenderungan krisis ideologi politik di tubuh partai politik. Perbincangan ideologi tentu tidak terlepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik yang visioner dan filosofis, kemudian dikembangkan melalui sistem dan metode yang konsisten serta mampu menginternalisasinya menjadi pola dan tindakan politik dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, sejauh mana ideologi masih menjadi alat dan tujuan politik yang terbangun secara sistemik, terencana dan konsisten di seluruh elemen struktural dan fungsional partai politik. (Hasnu & Firdaus Syam, 2021, p. 1621)

Permasalahan terkait ideologi partai politik yang sering terjadi adalah seringkali ideologi tersebut tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan dan partai lebih bersifat pragmatis. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal partai sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi. Fenomena ini bisa dilihat dalam tubuh PDIPerjuangan, dimana seharusnya PDIPerjuangan sebagai partai yang bercirikan partai pembela rakyat kecil (*wong cilik*) dengan ideologi marhaenisme sebagai ajaran sakti Soekarno yang berpihak terhadap kaum kecil seperti petani, nelayan, pedagang justru dalam praktek dilapangan lebih banyak berpihak kepada kaum oligarki yang ada di negeri ini serta masih banyak kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi dan suap serta lewat produk-produk hukum dan kebijakan

politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil (*wong cilik*). (Wiwin Kurniasih, 2018, p. 10)

Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh kasus, seperti PDIPerjuanganyang mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* yang kini telah menjadi produk Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), diketahui, Undang-undang ini yang isinya berpihak terhadap kepentingan oligarki. Bukan hanya itu, kebuntutan lain dalam tubuh PDIPerjuangan adalah kasus korupsi terhadap kader-kader partainya. Sebut saja kasus Harun Masiku tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Wahyu Setiawan, hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan khusus partai politik yakni merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional, sebab tindakan suap terhadap eks mantan Ketua KPURI merupakan tindakan nonkonstitusional dalam berdemokrasi. Kemudian, kasus yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi Bansos Covid-19, diketahui Juliari Batubara merupakan kader PDIPerjuangan. Bahkan, kasus korupsi Bansos Covid-19 melibatkan beberapa kader PDIPerjuangan seperti Ketua DPC PDIPerjuangan Kendal. PDIPerjuangan adalah satu partai politik yang menyetujui kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM, dimana kebijakan ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat, terutama masyarakat golongan kecil

seperti petani, nelayan, pedagang yang merupakan representasi orang kecil atau wong cilik. Artinya bahwa PDIPerjuanganketika memegang tampuk kekuasaan tidak menunjukkan karakter kebijakan yang berpihak kepada orang kecil atau wong cilik, PDIPerjuangan tak ubahnya seperti Golkar di era Orde Baru. Padahal, segmen identitas dan identifikasiPDIPerjuangan sebagai partainya wong cilik hanya menjadi sebuah jargon politik semata dalam rangka menarik simpati dan mendulang suara dalam pemilu.

Fenomena yang terjadi di level pusat atau nasional yang mendera PDIPerjuangan, mengenai permasalahan terkait ideologi partai politik yang sering terjadi adalah seringkali ideologi tersebut tidak dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan partai lebih bersifat pragmatis. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan dan pengambilan keputusan dalam internal maupun eksternal partai sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideology, bisa dilihat juga di Nusa Tenggara Timurdalam beberapa contoh kasus seperti:

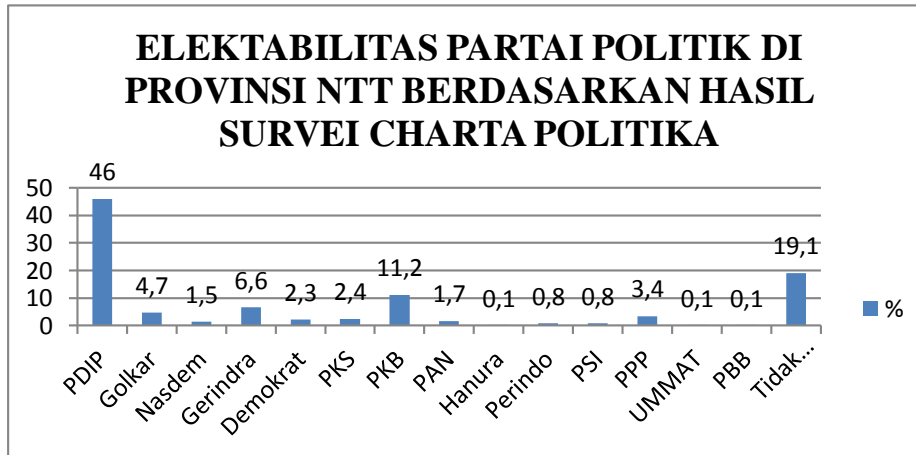
1. Ketua DPC PDIPerjuangan Kota Kupang sekaligus Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe dilaporkan oleh Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Sara (AMPAS) Kota Kupang yang tergabung dalam organisasi lokal maupun Nasional sepertiPMII, PMKRI Cabang Kupang, ITAKANRAI, PERMASNA, PERMAI, HM3T, IMMALA terkait ujaran kebencian dan provokasi bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dimana Yeskiel Loudoe menyebutkan bahwa demonstrasi

yang dilakukan kelompok masyarakat di Kantor DPRD Kota Kupang pada Jumat, 28 Mei 2021, ditunggangi oleh agama dan etnis tertentu untuk menjatuhkannya dari kursi pimpinan DPRD.

2. Keluarnya Raymundus Sau Fernandes dan Dolvianus Kolo dari PDIPerjuangan, pasca keluarnya putusan dari DPP PDIPerjuangan yang menetapkan Marianus Sae yang notabene bukan kader PDI Perjuangan dan Emilia Nomleni sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023.

3. DPD PDI Perjuangan Perjuangan Provinsi NTT tidak melaporkan keuangannya secara akuntabel sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat tentang laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT belum transparan dalam melaporkan keuangannya, karena pengungkapan informasi keuangan partai politik kepada masyarakat belum dilaksanakan.

Beberapa contoh kasus diatas yang mendera PDI Perjuangan justru tidak berimbas terhadap elektabilitas PDI Perjuangan di Provinsi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Charta Politika di tahun 2022, menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang mengungguli 13 partai politik lainnya seperti Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PAN, Hanura, Perindro, PSI, PPP, PBB dan Partai Ummat.(Yohanes Liestyo Poerwoto, 2022)



Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **ORIENTASI MARHAENISME DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Orientasi DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Terhadap Marhaenisme sebagai Orientasi Perjuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Orientasi DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Terhadap Marhaenisme sebagai Orientasi Perjuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini, Yaitu:

- a. Sebagai Bahan Evaluasi dan Sumbangan Ilmiah bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tentang Orientasi Marhaenisme PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan Tentang Orientasi Marhaenisme PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang orientasi marhaenisme PDI-P, khususnya di DPD PDI-P Nusa Tenggara Timur.
- b. Sebagai input atau bahan masukan bagi partai politik khususnya PDI Perjuangan dalam pembumian ajaran marhaenisme terhadap kadernya.